BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah sekumpulan prinsip, aturan, dan nilai yang menjadi acuan dalam merancang rencana, mengatur kepemimpinan, serta menentukan tindakan dalam suatu pekerjaan. Baik dilingkup pemerintah swasta individu dan organisasi lainnya untuk membuat keputusan.

Menurut Anderson dalam Hill and Dupe 2002 Kebijakan sebagai rangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok yang memiliki wewenang untuk mengatasi masalah atau tantangan tertentu. Tindakan ini biasanya dirancang untuk mencapai solusi atau perbaikan dalam menghadapi permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. (Handoyo 2012)

Fredrick (Islamy, 1998) Kebijakan adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dirancang oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam situasi tertentu. Dalam prosesnya, kebijakan ini mempertimbangkan berbagai tantangan serta peluang yang ada untuk memastikan usulan tersebut bisa diterapkan dengan baik demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Muadi, MH, and Sofwani 2016).

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (*governance*), yang mengatur interaksi antara negara dengan masyarakat (Handoyo 2012). Setiap pihak yang memegang kekuasaan tentu kepentingan untuk mengatur dan mengendalikan negara, serta memastikan pengelolaannya

berjalan dengan baik. Mengelola berarti mengatur dan membuat sesuatu menjadi lebih berharga. Dalam konteks negara, pemerintah tidak hanya mengarahkan dan menentukan tujuan negara, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan nilai negara melalui kebijakan publik. Itulah sebenarnya tugas utama pemerintah atau negara. berusaha untuk mempengaruhi arah kebijakan dan keputusan yang diambil demi menjaga kestabilan dan keberlanjutan negara.

Kebijakan publik adalah keputusan dan tindakan yang dibuat atau diabaikan oleh pemerintah, baik oleh individu maupun kelompok dalam pemerintahan, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan manfaat bagi kepentingan publik dan mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. (Muadi, MH, and Sofwani 2016).

3. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah langkah penting dalam proses kebijakan publik. Agar sebuah program kebijakan dapat memberikan hasil atau mencapai tujuan yang diinginkan, kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara efektif (Kasmad 2018).

Implementasi kebijakan menurut Jonas adalah seperangkat aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan suatu program yang dirancang untuk menimbulkan akibat atau dampak tertentu, implementasi kebijakan memiliki peranan penting dalam organisasi, interpretasi dan penerapan. (Azmi, Syukur, and Amelia 2022).

Menurut Agustino (2008:39) dalam Sutmasa **(** 2021:28) Mengatakan bahwa:

> Implementasi kebijakan merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil oleh pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah, kelompok organisasi, atau sektor swasta, untuk melaksanakan keputusan yang

> telah ditetapkan dalam kebijakan. Tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, dengan mengikuti pedoman dan arah yang ada dalam kebijakan tersebut, baik melalui peraturan, program, ataupun proyek yang dijalankan.

b. Model Implementasi Kebijakan

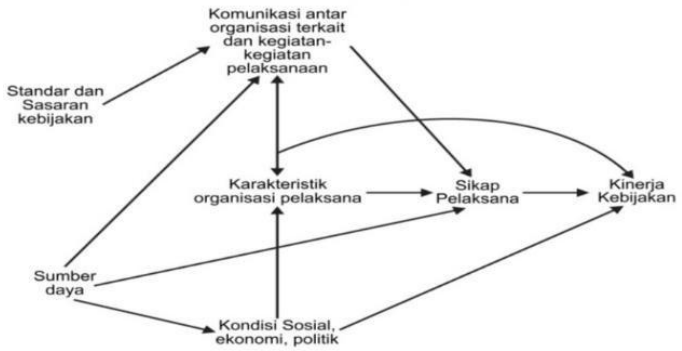
Model implementasi kebijakan adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menerjemahkan kebijakan dari konsep menjadi tindakan nyata di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat, yang bekerja sama untuk memastikan kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam (Tachjan 2006) Mengatakan bahwa

> Implementasi kebijakan adalah tahap yang lebih praktis, di mana kebijakan yang telah dirumuskan mulai dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan formulasi kebijakan, yang lebih bersifat teoritis, yaitu tahap perencanaan dan penyusunan kebijakan sebelum diterapkan dalam tindakan nyata.

1) Model Implementasi Van Meter dan Horn

Gambar 7
Model Implementasi Van dan Horn 1975



Sumber: (Tachjan 2006)

Van Meter dan Horn (Tachjan 2006) mengembangkan model implementasi kebijakan dengan sebutan *A Model of the Policy Implementation Process* yang menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Yang dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan, yaitu bagaimana memahami standar dan tujuan kebijakan, karena standar dan tujuan kebijakan berhubungan dengan sikap para pelaksana.
2. Sumber daya, yaitu kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sumber daya manusia, finansial, dan waktu.
3. Karakteristik organisasi pelaksana, yaitu kondisi akibat tekanan lingkungan birokrasi, termasuk lingkungan politik hingga konstitusi.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana, yaitu para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan mengetahui harus dilakukan, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan, serta koordinasi di antara pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan
5. Sikap para pelaksana, yaitu penerimaan versus penolakan bergantung pada pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan pribadi organisasinya
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, yaitu lingkungan eksternal kebijakan publik mendukung versus menekan.

2) Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

Gambar 8
Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier



Sumber: (Tachjan 2006)

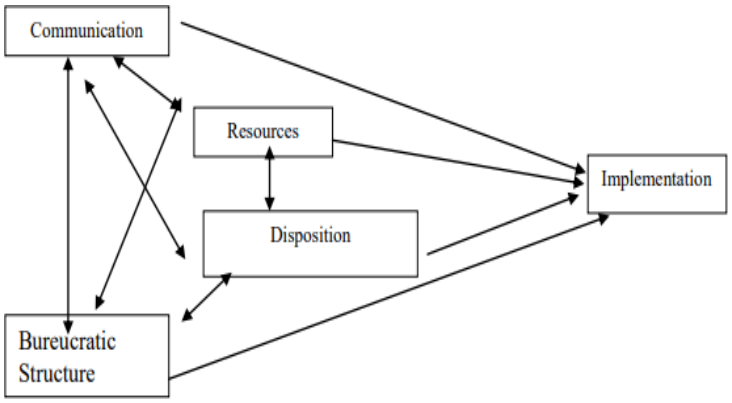
Model implementasi Mazmanian dan Sabatier disebut juga dengan model kerangka analisis implementasi yang meliputi tiga variabel, yaitu:

1. Variabel *Independen*, yaitu mudah atau tidaknya masalah dikendalikan, berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki
2. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan.
3. Variabel *dependen,* yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yakni pemahaman dari lembaga atau badan

pelaksana dengan bentuk susunan kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan mengarah pada revisi kebijakan yang telah dibuat serta dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3) Model Implementasi George Edward III

Gambar 9
Model Implementasi George Edward III



Sumber: (Kasmad 2018)

Model implementasi George Edward III (Kasmad 2018: 59) ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*) yaitu bagaimana kebijakan itu di komunikasikan baik pada sektor publik maupun swasta dengan melihat respon dan juga sumber daya yang ada.
2. Sumber Daya (*resource*) yaitu tentang ketersediaan sumber daya, terutama sumber daya manusia sebagai pendukung dalam pengimplementasian suatu kebijakan.
3. Komitmen (*Disposition*) berkaitan dengan komitmen para implementator dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*) adalah kesesuaian organisasi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik.

4. Krisis Air Bersih

a) Definisi Krisis Air Bersih

Krisis adalah keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara tersedianya air bersih dan permintaan air bersih, pada dasarnya hanya sekitar 2,5% dari total air di bumi yang merupakan air bersih (fresh water). Air sangat

penting untuk mendukung berbagai aktivitas manusia, seperti mandi, memasak, mencuci, dan kebutuhan lainnya.

b) Dampak Krisis Air bersih

Sumber daya yang digunakan oleh manusia untuk konsumsi atau kegiatan sehari-hari, termasuk untuk sanitasi. Meskipun air ada di mana-mana, kenyataannya, jumlah air bersih yang aman dan layak untuk dikonsumsi sangat terbatas (R Widiastutie 2023). Setiap tahunnya, banyak orang, terutama anak-anak di negara berkembang, meninggal akibat penyakit yang berkaitan dengan kurangnya kebersihan dasar, yang salah satunya disebabkan oleh krisis air bersih.

Krisis air bersih dapat memiliki dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Air yang tercemar bisa mengandung berbagai mikroorganisme berbahaya, seperti bakteri, virus, dan parasit, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti:

1. Diare, diare adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit. Kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi, yang jika tidak ditangani dengan baik, bisa membahayakan nyawa.
2. Kolera, kolera merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Kolera dapat menyebabkan diare yang sangat hebat, sehingga dapat menyebabkan kematian.
3. Tifus, tifus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi*. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala seperti demam tinggi, sakit kepala, dan diare.

c) Faktor penyebab krisis air Bersih

Beberapa faktor yang menyebabkan krisis air adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan Air Tanah yang Berlebihan

Air tanah adalah air yang tersimpan di dalam lapisan bawah permukaan tanah, mengisi celah-celah atau pori-pori batuan, dan

berada di bawah tingkat permukaan air tanah. Lapisan yang menyimpan air ini disebut akuifer, yaitu formasi geologi yang dapat menampung dan mengalirkan air dalam jumlah yang cukup besar dan bernilai ekonomis. Bentuk serta kedalaman akuifer terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan cekungan air tanah. (Rejeki Ningrum 2009).

2. Kondisi Iklim

Curah hujan yang tidak menentu membuat ketersediaan air sulit diprediksi sepanjang tahun, terutama di daerah yang bergantung pada air hujan. Kondisi ini dapat menghambat perencanaan penyimpanan dan distribusi air bersih. Musim kemarau yang panjang bisa menyebabkan berkurangnya air di sungai, waduk, dan sumber air tanah, sehingga pasokan air bersih menjadi terbatas. Selain itu, kekeringan juga mempercepat penguapan air dari waduk, danau, dan sungai, yang merupakan sumber utama air bersih di banyak daerah. Air di bumi bergerak secara alami melalui proses penguapan, pembentukan awan (kondensasi), turunnya hujan atau salju (presipitasi), dan aliran air yang kembali ke laut. Siklus hidrologi ini dipengaruhi langsung oleh kondisi iklim, karena perubahan suhu, kelembapan udara, dan pola hujan dapat memengaruhi jumlah air yang mengalir di permukaan maupun yang tersimpan di dalam tanah. Ketersediaan air bersih sangat bergantung pada keseimbangan siklus hidrologi, sehingga setiap perubahan iklim dapat berdampak pada jumlah, kualitas, dan distribusi air bersih.(Haura Fathia Chefany, M. Rifky Nugroho, Rodiah Rauzatul Jannah, Umi Annisa 2024).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyediaan Air Minum, menyatakan bahwa sistem suplai air bersih yang di lakukan oleh PDAM meliputi 2 cara, yaitu :

1. Suplai air bersih dengan sistem perpipaan, dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
2. Suplai air bersih dengan sistem non perpipaan Dalam Sistem non perpipaan air diperoleh dari sumur dangkal, sumur bor, pompa tangan, penampungan air hujan, tangki air, dan bangunan pelindungan mata air. Sistem non perpipaan merupakan sistem individual. Dalam sistem ini standarisasi kualitas air bersih yang diperoleh sangat sulit untuk di pantau karena sistem dikendalikan oleh masing - masing pengguna.

5. Penanggulangan Krisis Air Bersih

Dalam Undang-undang Republik Indonesia NO 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Untuk mencegah krisis air bersih dan menjaga kelestarian sumber daya air, UU Sumber Daya Air mengaturnya melalui pengelolaan yang terencana. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai upaya. Seperti konservasi air, pemanfaatan air secara bijak, serta pencegahan dan penanganan dampak negatif air, seperti banjir atau pencemaran. Ada 3 program utama yang saling berkaitan untuk menjaga kelestarian sumber daya air, yaitu:

1. Konservasi Sumber Daya Air

upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan , sifat dan fungsi sumber daya air agar tersedia dalam kuantitas dan kualitasnya dalam memenuhi kebutuhan manusia, Konservasi sumber daya air harus mengikuti rencana pengelolaan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti menjaga dan melestarikan sumber air, menghemat penggunaan air, memastikan kualitas air tetap baik, serta mencegah pencemaran. Upaya konservasi ini dilakukan di berbagai tempat, seperti mata air, sungai, danau, waduk, rawa, area resapan air tanah, cekungan air tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan yang dilindungi seperti hutan, suaka alam, dan wilayah pesisir.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pendayagunaan sumber daya air adalah cara mengatur, menyediakan, menggunakan, dan mengembangkan air secara efisien agar bermanfaat secara maksimal. Tujuan utamanya adalah memastikan air tersedia secara berkelanjutan, dengan prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pemanfaatan ini mencakup berbagai sumber air, seperti mata air, sungai, danau, waduk, rawa, air tanah di cekungan air tanah, air hujan, serta air laut yang digunakan di daratan.

3. Pengendalian Daya Rusak Air

Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk melindungi lingkungan dari dampak buruk air, seperti banjir, erosi, dan pencemaran. Caranya dengan mencegah kerusakan sejak awal, menangani masalah yang terjadi, serta memulihkan kondisi agar ekosistem tetap sehat dan bisa digunakan oleh masyarakat dengan aman.

2. Upaya PDAM Dalam Mengatasi Krisis Air Bersih

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar NO 7 Tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Kota Makassar menyebutkan bahwa tujuan PDAM memberikan pelayanan air bersih/minum untuk kebutuhan berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan. Berkaitan dengan tersebut upaya yang dilakukan PDAM dalam mengatasi permasalahan ini diikutkan dengan misi dari PDAM yaitu menyediakan air yang berkualitas, kuantitas dan kontinuitas. Adapun upaya yang dilakukan PDAM dalam mengatasi permasalahan krisis air bersih yang terjadi khususnya pada wilayah utara Kota Makassar adalah sebagai berikut:

a) Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Baru

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar dalam peningkatan pelayanan meski memang masih banyak aduan dari pelanggan seperti tidak dapat air dan air. Salah satu daerah yang banyak mengeluhkan pelayanan air bersih dari PDAM adalah daerah utara Kota Makassar yang banyak mengeluh tidak dapat air. Hal tersebut tidak lepas dari beberapa faktor di antaranya karena daerah tersebut masih tersuplai dari IPA II Panaikang dengan mengandalkan sumber air baku dari Bendungan Leko Pancing yang kondisinya sering mengalami kekeringan saat musim kemarau. Terkait hal tersebut, untuk meningkatkan layanan di daerah utara kota terlebih saat musim kemarau, Perumda Air Minum Kota Makassar melakukan *ground breaking* pemasangan jaringan pipa distribusi utama dengan diameter 500, 450, dan 400 mm. Yang nantinya jaringan tersebut akan *memback-up* utara kota melalui layanan IPA V Sombaopu yang ketersediaan air bakunya sangat baik dari Bendungan Bili-Bili. Jika kemarau terjadi.

b) Layanan Mobil Tangki Air Gratis

PDAM Kota Makassar bergerak cepat menangani krisis air bersih yang sedang terjadi, terutama di wilayah Tallo. Karena kemarau panjang, banyak warga di sana kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Untuk membantu, PDAM menurunkan mobil tangki yang mengantarkan air bersih langsung ke warga secara gratis. Ini adalah bentuk kepedulian PDAM agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan air sehari-hari meski pasokan air utama sedang bermasalah. Warga yang membutuhkan bisa langsung menghubungi PDAM lewat nomor yang sudah disediakan, seperti 0853-995-3858 atau call center di 1500411 dan WhatsApp di 0811-4641-123.

3. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan masalah yang menjadi temuan bagi peneliti dan dijadikan acuan untuk dapat ditinjau yaitu.

a) Tahun 2019, Muh. Fajaruddin Natsir, dkk., melakukan pengabdian masyarakat sekaligus melakukan penelitian di kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan menemukan permasalahan krisis air bersih pada daerah tersebut pasalnya PDAM yang sulit menjangkau daerah tersebut karena lokasi yang jauh tepat di arah Timur kota Makassar. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muh Fajaruddin, dkk., mereka melakukan pelatihan kepada masyarakat guna untuk menghadapi tantangan krisis air yang akan dihadapi di kemudian hari, pelatihan yang diberikan adalah dengan pengolahan air melalui filtrasi air untuk mengurangi kadar besi dan klorida pada air. (Fajaruddin Natsir et al. 2019).

b) Tahun 2019, Nurul Ahmira dan Herlina Sakawati melakukan penelitian dengan merujuk pada kualitas pelayanan penyediaan air bersih di PDAM, penilitian dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, dengan mengambil studi kasus pada kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota

Makassar, di mana diketahui bahwa kelurahan ini merupakan salah satu daerah yang mengeluhkan krisis air bersih, pada penelitian tersebut ditemukan permasalahan suplai air yang dialirkan ke rumah pelanggan masih mengalami kemacetan sehingga warga melakukan pengaduan terhadap PDAM namun masih kurang optimalnya pelayanan yang diberikan sehingga dikatakan kurang maksimal dalam menangani keluhan masyarakat. (Ahmira Nurul 2019).

c) Tahun 2024, Wahyu Karunia Galib, dkk., melakukan penelitian dengan judul peran pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih di kota Makassar, pada penelitian ini ditemukan masalah krisis air bersih ada kecamatan Biringkanaya tepatnya di kelurahan Untia yang mengeluhkan krisis air bersih dalam waktu yang lama, penelitian ini berfokus pada bagaimana peran pemerintah dalam penyediaan air bersih, dengan menggunakan analisis peran pemerintah seperti tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa wilayah kelurahan Untia yang menggunakan air skala besar menggunakan air dari PDAM. Permasalahan yang menyebabkan krisis air ini juga disebabkan oleh adanya industri di sekitar wilayah Untia. Pada penelitian ini melibatkan instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, namun adanya keterbatasan pembangunan prasarana dikarenakan wilayah Untia berada di wilayah pesisir sehingga jika dilakukan pengeboran air akan tetap payau/asin (Galib et al. 2024).

B. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Definisi *Policy Brief*

Berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah “Risalah Kebijakan (*Policy Brief*) adalah tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada kebijakan tertentu serta menawarkan rekomendasi kebijakan atau alternatif solusi

atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan.

Policy brief adalah tulisan yang menyajikan alternatif kebijakan atau tindakan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan publik, berfungsi sebagai alat komunikasi yang memengaruhi proses tersebut. (Makhya and Mukhlis 2021).” Dan Menurut Pokhrel, dkk (2017) “*policy brief* merupakan alat untuk menjelaskan secara singkat arti penting hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian menjawab permasalahan yang ada, serta apa rekomendasi yang disarankan terhadap masalah kebijakan yang dihadapi”.

Policy Brief Biasanya digunakan dalam proses advokasi kebijakan yang menjadi alat pengukur untuk meyakinkan pembuat kebijakan atau kelompok sasaran tentang urgensi masalah yang ada saat ini dan mengambil alternatif solusi dari kebijakan yang ditawarkan.

2. Fungsi Policy Brief

Menurut peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah tujuan dari penulisan policy brief memiliki 2 tujuan utama yaitu media untuk eksplorasi dan advokasi yaitu sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi. *Policy brief* sebagai media eksplorasi tidak hanya memberikan sebuah rekomendasi terpilih namun *policy brief* juga sebagai media advokasi memberikan pilihan terhadap sebuah solusi tertentu. Sesuai dengan peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017 untuk membuat *policy brief* terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan yaitu:

a. fokuskan pada suatu masalah kebijakan;
b. jelaskan tujuan;
c. identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan;
d. identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan;
e. susun rekomendasi yang dapat digunakan (accessible) oleh target pembaca atau audiens; dan

f. batasi tulisan kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kata, dengan jumlah halaman 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) halaman (maksimal 8 (delapan) halaman).

Dalam peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 terdapat perbedaan antara *policy brief dengan policy paper, policy paper* lebih bersifat akademik dan sangat dibutuhkan oleh kalangan ilmiah yang sangat mementingkan logika dan argumentasi akademik. Yang di mana dari keduanya dapat dilihat dari bagaimana rekomendasi kebijakan itu disampaikan kepada pembuat kebijakan.

3. Tujuan Policy Brief

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan, Tujuan umum dari *policy brief* adalah untuk mendukung kebijakan atau pembuat keputusan berdasarkan informasi yang relevan (*informed-based*) pada organisasi-organisasi yang relevan (memiliki wewenang untuk membuat kebijakan/membuat keputusan).

4. Format Penyusunan *Policy Brief*

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan, sistematika penulisan *policy brief* setidaknya memuat komponen-komponen berikut:

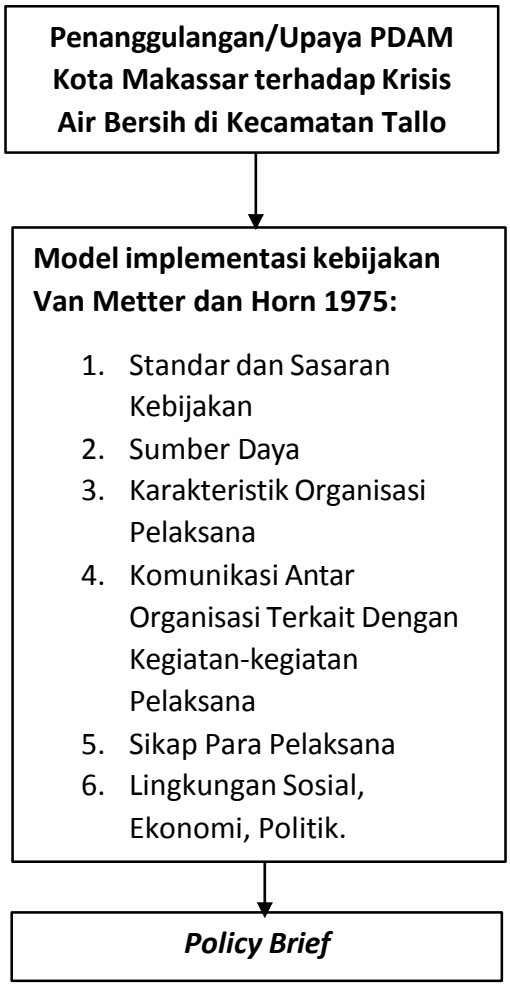
a) Judul
   1) Menarik sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanjut
   2) Memunculkan minat pembaca
   3) Singkat dan jelas mewakili substansi isi tulisan
b) Ringkasan eksekutif (*Executif summary*)
   1) Terdapat faktor-faktor yang menjadi akar masalahnya
   2) Mengapa masalah tersebut perlu/strategis
   3) Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut
c) Pendahuluan

1) Terdiri dari beberapa kalimat ringkas akan tetapi menarik minat untuk membaca secara keseluruhan
2) Mengungkapkan urgensi dari topik yang diangkat

d) Deskripsi masalah
   1) Spesifik langsung ke inti permasalahan
   2) Terukur disertai bukti-bukti yang memadai (*evidence-based*)
   3) Analisis (apa, di mana, siapa, mengapa, dampak/efek)
e) Rekomendasi
   1) Spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat
   2) Terukur, dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan (Stakeholder) serta didukung oleh faktor-faktor yang ada
   3) Alternatif (disertai analisis singkat, metode penentuan/pemilihan dan gambaran singkat alternatif yang dipilih)
f) Apendiks
g) Referensi utama

C. Kerangka Pikir

Gambar 10
Kerangka Pikir



Sumber: Peneliti, 2025